































terendahnya. Imam syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan *fuqaha* Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Maliki.

Sebagian fuqaha lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, adalagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Perbedaan pendapat ini menurut Ibnu Rusyd dikarenakan dua hal sebagai berikut:

Ketidakjelasan akad nikah yang berfungsi sebagai sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan mereka menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan fungsinya sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab ditinjau dari satu sisi, dengan mas kawin seorang laki-laki dapat memiliki "jasa" seorang wanita untuk selamanya. Dengan demikian, perkawinan mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan maskawin, maskawin itu mirip dengan ibadah.

Adanya pertentangan antara *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan pengertian hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan.























Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *Ushul Fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

b. Pada dasarnya, syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-muḍarabah*). Praktik seperti itu sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Sedangkan alasan *'urf* dijadikan dalil adalah sebagai berikut:

a. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku di masyarakat.



bisa diterima apabila tidak ada *naş* yang menjelaskan hukum permasalahan yang dihadapi.

- b. Harus bisa diterima dan berlaku secara umum. Dalam artian *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. *'urf* itu harus dikenal, dipahami dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat.
- c. *Al 'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan diterapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- d. Adat yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang dilakukan atau diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.